

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN PESISIR KECAMATAN WAPLAU KABUPATEN BURU

Yatsrib Akbar Sowakil

Program Pascasarjana Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Ambon

E-mail: yatsribakbarsowakilsowakil@gmail.com

Received 03-07-2026 | Received in revised form 24-07-2026 | Accepted 17-08-2026

Abstract

The coastal fishing communities of Waplau Subdistrict, Buru Regency, continue to face limited fishing technology, weak market access, low educational attainment, limited capital, dependence on fish traders, and uneven distribution of empowerment assistance. These conditions have constrained the ability of local fisheries resources to generate sustainable improvements in fishermen's welfare. The findings indicate that government empowerment programs have provided tangible benefits to fishing activities, although their impacts remain uneven and have not fully addressed the structural problems faced by coastal households. Among 45 respondents, 22.2% considered the assistance very beneficial, while 55.56% considered it beneficial. Nevertheless, weaknesses in group-based assistance management, limited training, low educational attainment, seasonal dependence, and restricted market access remain significant constraints. Fishermen's economic conditions are also affected by low fish prices and the dominant role of fish collectors in determining prices. The SWOT analysis generated seven alternative empowerment strategies: expanding fisheries business scale, increasing fishing fleets, ensuring targeted government assistance, developing marketing governance training, diversifying fish processing, formulating regulations to stabilize fish prices, and managing catches through community-based approaches. The AHP analysis identified the formulation of regional regulations concerning fish price stability as the highest priority at 45.7%, followed by targeted government assistance at 19.6% and additional fishing fleets at 12.3%, with a consistency ratio of 7.7%. These findings demonstrate that fishermen empowerment in Waplau should move beyond the provision of production equipment toward market governance, strengthening fishermen's bargaining position, equitable assistance distribution, capacity development, and community institutional strengthening.

Keywords: community empowerment, coastal fishermen, Waplau Subdistrict, SWOT, AHP, Buru Regency.

Abstrak

Masyarakat nelayan pesisir Kecamatan Waplau Kabupaten Buru masih menghadapi persoalan rendahnya kapasitas usaha, keterbatasan teknologi penangkapan, lemahnya akses pemasaran, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan modal, ketergantungan terhadap pedagang pengumpul, serta belum meratanya manfaat program pemberdayaan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi sumber daya perikanan yang relatif besar belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi aktivitas usaha nelayan, tetapi dampaknya belum merata dan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan struktural yang dihadapi masyarakat pesisir. Dari 45 responden, 22,2% menyatakan bantuan sangat bermanfaat dan 55,56% menyatakan bermanfaat. Namun, pengelolaan bantuan kelompok yang masih terkonsentrasi pada individu, minimnya pelatihan, rendahnya

pendidikan, ketergantungan terhadap musim, serta lemahnya akses pasar menjadi kendala utama. Kondisi ekonomi nelayan juga dipengaruhi oleh rendahnya harga ikan dan dominannya pedagang pengumpul dalam menentukan harga. Analisis SWOT menghasilkan tujuh alternatif strategi, yaitu memperbesar skala usaha perikanan, penambahan armada tangkap, bantuan pemerintah yang tepat sasaran, pelatihan tata kelola pemasaran, diversifikasi pengolahan ikan, perumusan regulasi kestabilan harga ikan, dan pengelolaan hasil tangkap berbasis masyarakat. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa prioritas tertinggi adalah perumusan Peraturan Daerah terkait kestabilan harga ikan sebesar 45,7%, diikuti bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebesar 19,6% dan penambahan armada tangkap sebesar 12,3%, dengan nilai Consistency Ratio 7,7%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan Kecamatan Waplau perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan sarana produksi, tetapi juga pada penguatan tata kelola pasar, perlindungan posisi tawar nelayan, pemerataan bantuan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, nelayan pesisir, Kecamatan Waplau, SWOT, AHP, Kabupaten Buru.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Namun, besarnya potensi tersebut belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir. Tesis ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir masih sering berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, terutama karena keterbatasan akses terhadap sumber daya, permodalan, teknologi dan pasar. Kondisi tersebut juga ditemukan di Provinsi Maluku. Kabupaten Buru merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan cukup besar, tetapi masyarakat nelayan masih menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap faktor produksi. Kecamatan Waplau merupakan salah satu wilayah pesisir Kabupaten Buru yang masyarakatnya banyak menggantungkan kehidupan pada pertanian, perikanan dan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Waplau mencapai 13.071 jiwa, dengan 6.593 laki-laki dan 6.478 perempuan. Persoalan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Waplau tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat tangkap. Nelayan masih menghadapi keterbatasan modal, pemasaran, teknologi, produksi dan akses terhadap sumber

daya. Dalam kondisi demikian, sebagian nelayan membangun hubungan ekonomi dengan tengkulak untuk memperoleh modal maupun memasarkan hasil tangkapan. Hubungan tersebut membantu nelayan dalam jangka pendek, tetapi sekaligus menciptakan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar nelayan. Pemerintah Kabupaten Buru telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan sosial ekonomi, mendorong usaha produktif, memperkuat manajemen pembangunan yang partisipatif dan meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir. Di Kecamatan Waplau, program bantuan telah berlangsung pada 2018–2022 dan mencakup berbagai bantuan berupa armada tangkap, mesin, GPS, cool box, alat tangkap, peralatan pengolahan dan sarana pendukung lainnya.

Persoalannya adalah keberadaan bantuan belum otomatis menghasilkan kemandirian ekonomi. Penelitian menemukan bahwa sebagian bantuan belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terdapat pengelolaan bantuan kelompok yang terkonsentrasi pada individu. Selain itu, minimnya pelatihan menyebabkan bantuan sarana produksi belum selalu diikuti peningkatan kemampuan pengelolaan usaha. Karakteristik sumber daya manusia menjadi persoalan penting. Dari 45 responden, sebanyak 23 orang atau 51,11% hanya berpendidikan SD, 13 orang atau 28,89% berpendidikan SMP dan 9 orang atau 20% berpendidikan SMA. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap penguasaan teknologi, manajemen usaha, kemampuan pemasaran dan kemampuan mengembangkan usaha perikanan. Persoalan lainnya adalah diversifikasi mata pencaharian. Sebanyak 20 responden atau 44,4% memiliki pekerjaan sampingan sebagai penambang emas, sementara 11 responden atau 24,4% bekerja sebagai petani bawang. Aktivitas di luar sektor perikanan tersebut berpengaruh terhadap frekuensi melaut. Rata-rata responden hanya melaut sekitar 17 kali dalam sebulan. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian bantuan fisik. Pemberdayaan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas, kemandirian, kemampuan mengakses sumber produktif, partisipasi dan penguatan posisi masyarakat dalam proses

pembangunan. Kerangka pemikiran tesis juga menempatkan produksi, teknologi, pendapatan, alat tangkap dan bantuan sebagai faktor internal, sedangkan kondisi alam, sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan pasar sebagai faktor eksternal yang menentukan strategi pemberdayaan.

Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi menentukan prioritas strategi yang paling dibutuhkan masyarakat pesisir Kecamatan Waplau.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Juni–Juli 2022 di Kecamatan Waplau Kabupaten Buru. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan kepustakaan. Sumber data utama berasal dari informan dan hasil pengamatan lapangan, sedangkan data tambahan diperoleh melalui dokumen pemerintah dan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Responden nelayan yang digunakan dalam penelitian berjumlah 45 orang. Data kuantitatif yang diperoleh dari responden digunakan sebagai pendukung analisis kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Perumusan strategi dilakukan dengan dua instrumen utama, yaitu Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Selanjutnya alternatif strategi yang diperoleh dari SWOT diprioritaskan menggunakan AHP. Responden AHP berasal dari pihak yang memiliki pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan, termasuk unsur Dinas Kelautan dan Perikanan serta kelompok nelayan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Potensi Perikanan dan Kondisi Usaha Nelayan

Perikanan tangkap Kecamatan Waplau berada dalam konteks potensi sumber daya ikan Kabupaten Buru yang cukup besar. Data produksi komoditas perikanan Kabupaten Buru menunjukkan produksi 9.210,41 ton pada 2018, 6.512,33 ton pada 2019, 8.192,04 ton pada 2020, 11.090,93 ton pada 2021 dan 12.287,16 ton pada 2022. Komoditas yang dominan antara lain ikan layang, tuna, ikan lainnya, tongkol/komu, selar dan cakalang.

Tabel 1. Produksi Komoditas Perikanan Kabupaten Buru 2018–2022

Jenis ikan	2018	2019	2020	2021	2022
Udang laut	1,82	10,99	12,80	54,57	36,82
Cakalang	716,70	317,25	376,48	567,80	704,10
Kembung	535,13	516,33	483,11	639,18	569,51
Julung-julung	140,09	283,09	495,33	631,35	544,56
Teri	653,58	295,88	183,00	335,27	336,95
Layang	2.025,25	1.075,25	1.227,47	1.830,24	1.882,83
Selar	687,74	390,94	563,76	717,59	798,55
Tuna	783,70	945,23	788,01	1.403,49	1.358,26
Cumi-cumi	4,75	58,55	184,20	232,82	245,20
Teripang	1,35	1,65	2,17	15,51	7,00
Kerapu	78,05	79,59	93,63	169,85	195,53
Tongkol/Komu	1.049,78	401,58	610,59	866,84	1.327,68
Ikan lainnya	2.532,47	2.135,99	3.171,51	3.626,43	4.280,18
Total	9.210,41	6.512,33	8.192,04	11.090,93	12.287,16

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Buru, sebagaimana disajikan dalam tulisan.

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi produksi perikanan cukup besar, tetapi besarnya produksi pada tingkat kabupaten tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Waplau. Tesis justru menunjukkan bahwa nelayan Waplau masih menghadapi keterbatasan armada, teknologi, pasar dan sarana prasarana. Sebagian besar armada penangkapan berukuran kurang dari 5 GT sehingga wilayah penangkapan cenderung terkonsentrasi di sekitar perairan pantai. Teknologi penangkapan juga masih sederhana. Kondisi tersebut membatasi kemampuan nelayan untuk memperluas fishing ground dan meningkatkan produktivitas. Jumlah nelayan Kecamatan Waplau pada 2022 tercatat 567 orang yang tergabung dalam 15 kelompok nelayan. Konsentrasi terbesar berada di Desa Waprea dengan 170 nelayan dan Desa Waelihang dengan 120 nelayan. Dengan demikian, persoalan pemberdayaan tidak dapat hanya dilihat dari ada atau tidaknya sumber daya ikan. Masalah utama berada pada kemampuan nelayan mengubah potensi tersebut menjadi nilai ekonomi. Di sinilah teknologi, modal, keterampilan, kelembagaan dan pasar menjadi faktor penting.

3.2 Program Pemberdayaan dan Manfaat Bantuan

Program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Waplau telah berlangsung sejak 2018 sampai 2022. Bantuan mencakup armada tangkap, mesin katinting, mesin tempel, GPS, cool box, fish finder, jaring, alat pengolahan dan sarana pendukung lainnya. Bantuan tersebut secara objektif menunjukkan adanya intervensi pemerintah terhadap persoalan produksi nelayan. Namun, persoalan yang ditemukan penelitian menunjukkan bahwa bantuan fisik belum cukup untuk menghasilkan perubahan struktural. Dari 45 responden, 10 orang atau 22,2% menyatakan bantuan sangat bermanfaat, 25 orang atau 55,56% menyatakan bermanfaat, 7 orang atau 15,6% menyatakan kurang bermanfaat, dan 3 orang atau 6,7% menyatakan sangat kurang bermanfaat. Dengan demikian, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap bantuan, tetapi masih terdapat kelompok yang belum memperoleh manfaat optimal. Temuan ini penting karena

memperlihatkan dua sisi pemberdayaan. Pada satu sisi, bantuan pemerintah memang dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya. Pada sisi lain, efektivitas bantuan bergantung pada siapa penerimanya, bagaimana bantuan dikelola, apakah ada pelatihan, dan apakah bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha nelayan.

penulis menemukan bahwa salah satu persoalan internal adalah bantuan usaha kelompok yang dikelola oleh satu orang. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan dalam kelompok karena bantuan yang seharusnya menjadi aset bersama dapat lebih banyak digunakan untuk kepentingan individu. Karena itu, persoalan pemberdayaan sebenarnya bukan semata-mata kekurangan bantuan, melainkan tata kelola pemberdayaan. Bantuan yang besar sekalipun tidak akan menghasilkan kemandirian apabila tidak diikuti mekanisme kelompok yang transparan, pelatihan, pendampingan dan pengawasan.

3.3 Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan

Kondisi sosial nelayan Kecamatan Waplau menunjukkan karakteristik masyarakat perikanan skala kecil. Kelompok usia terbesar responden adalah 40–44 tahun, yaitu 15 orang atau 33,3%. Secara umum responden masih berada pada usia produktif. Namun, usia produktif tidak otomatis berarti produktivitas ekonomi tinggi. Persoalan yang lebih menentukan adalah pendidikan dan keterampilan. Sebanyak 51,11% responden hanya menyelesaikan pendidikan SD. Rendahnya pendidikan berimplikasi terhadap penguasaan teknologi, manajemen usaha dan kemampuan memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan usaha perikanan cenderung dijalankan dengan orientasi pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Penulis menemukan bahwa kultur kewirausahaan belum berkembang secara kuat dan pengelolaan usaha serta keuangan belum dilakukan secara optimal. Hal ini menjelaskan mengapa strategi pemberdayaan tidak cukup hanya berupa penambahan armada. Penambahan aset produksi harus berjalan bersama peningkatan kemampuan manusia yang mengoperasikannya.

3.4 Diversifikasi Mata Pencarian dan Berkurangnya Intensitas Melaut

Temuan penting penelitian adalah kuatnya diversifikasi mata pencarian nelayan. Dari 45 responden, 20 orang atau 44,4% bekerja sampingan sebagai penambang emas, 11 orang atau 24,4% sebagai petani bawang, 6 orang sebagai pedagang, 5 orang sebagai pengumpul batu, 2 orang sebagai ojek dan 1 orang sebagai tukang bangunan. Dominasi pekerjaan sampingan sebagai penambang emas mempunyai implikasi langsung terhadap aktivitas perikanan. penulis menemukan rata-rata frekuensi melaut hanya sekitar 17 kali dalam satu bulan. Pekerjaan sampingan menyebabkan waktu yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan berkurang sehingga mempengaruhi produksi nelayan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pilihan pekerjaan sampingan bukan hanya strategi ekonomi rumah tangga, tetapi juga indikator lemahnya daya tarik ekonomi sektor perikanan. Ketika nelayan melihat aktivitas lain memberikan peluang pendapatan yang lebih menjanjikan, waktu dan tenaga mereka berpindah dari laut ke sektor lain. Dengan demikian, peningkatan produksi perikanan harus dibarengi peningkatan keuntungan yang diterima nelayan. Jika harga ikan tetap rendah dan pasar tidak memberikan kepastian, penambahan armada saja belum tentu mampu mempertahankan nelayan dalam sektor perikanan.

3.5 Permasalahan Harga dan Akses Pasar

Persoalan paling mendasar dalam kondisi ekonomi nelayan Waplau adalah lemahnya posisi tawar dalam pemasaran. penulis menemukan bahwa harga ikan di lokasi penelitian cenderung rendah. Harga ikan pelagis dipukul rata sekitar Rp3.000/kg, sedangkan ikan karang sekitar Rp15.000–Rp20.000/kg. Pada saat yang sama, harga berbagai jenis ikan di pasar sebenarnya berbeda-beda. Ketimpangan tersebut terjadi karena keterbatasan sarana pemasaran. Pabrik es dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berfungsi sebagaimana mestinya. Nelayan sering harus segera menjual ikan karena keterbatasan es dan kemampuan penyimpanan. Situasi tersebut membuat pedagang pengumpul atau *dibo-dibo* mempunyai posisi tawar yang

lebih kuat. Rantai pemasaran juga relatif pendek tetapi tidak memberikan posisi tawar yang kuat kepada nelayan. Nelayan menjual kepada pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual kepada pengecer dan konsumen lokal. Pemasaran keluar Kabupaten Buru masih terbatas. Di sinilah persoalan pemberdayaan menjadi persoalan ekonomi-politik lokal. Nelayan memiliki sumber daya produksi, tetapi tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap pasar. Akibatnya, peningkatan produksi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Temuan tersebut juga menjelaskan mengapa hasil AHP menempatkan perumusan regulasi mengenai kestabilan harga ikan sebagai strategi nomor satu. Persoalan harga bukan sekadar persoalan ekonomi rumah tangga nelayan, melainkan persoalan kelembagaan pasar.

3.6 Faktor Internal Pemberdayaan

Hasil IFAS menghasilkan nilai total 3,32. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi internal masyarakat pesisir masih memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk menghadapi kelemahannya.

Tabel 2. Faktor Internal Strategi Pemberdayaan

Faktor	Skor
Tenaga kerja cukup	0,32
Ketekunan/motivasi masyarakat	0,63
Pengalaman melaut	0,42
Potensi sumber daya perikanan	0,79
Pendidikan rendah	0,32
Bantuan kelompok dikelola satu orang	0,21
Minim pelatihan usaha kelompok	0,32
Penangkapan tergantung musim	0,32
Total IFAS	3,32

Sumber: olah data Yatsrib Akbar Sowakil.

Kekuatan paling besar adalah potensi sumber daya perikanan dengan skor 0,79. Artinya, problem Waplau bukan ketiadaan sumber daya. Kekuatan berikutnya adalah motivasi masyarakat dengan skor 0,63 dan pengalaman melaut dengan skor 0,42. Sebaliknya, kelemahan utama berkaitan dengan pendidikan, pengelolaan kelompok, pelatihan dan ketergantungan terhadap musim. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan harus menghubungkan potensi sumber daya dengan kapasitas manusia dan kelembagaan. Sumber daya yang besar tanpa kapasitas pengelolaan hanya akan menghasilkan ekonomi ekstraktif yang manfaatnya tidak sepenuhnya diterima nelayan.

3.7 Faktor Eksternal Pemberdayaan

Hasil EFAS menghasilkan nilai total 2,88, yang oleh Penulis diinterpretasikan bahwa lingkungan eksternal masih memberikan peluang untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tabel 3. Faktor Eksternal Strategi Pemberdayaan

Faktor eksternal	Skor
Peluang kerja sama pemasaran	0,71
Dukungan pemerintah	0,88
Fasilitas kredit	0,53
Harga ikan tidak stabil	0,35
Tidak ada perlindungan terhadap praktik monopoli	0,18
Kondisi politik	0,24
Total EFAS	2,88

Sumber :

Dukungan pemerintah menjadi peluang eksternal terbesar dengan skor 0,88. Ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan pemerintah sebenarnya memiliki ruang

yang besar untuk memperbaiki kondisi nelayan. Namun, peluang tersebut berhadapan dengan ancaman harga ikan yang tidak stabil, lemahnya perlindungan terhadap praktik monopoli dan kondisi politik. Karena itu, kebijakan pemberdayaan perlu diarahkan pada pembangunan institusi pasar, bukan hanya institusi bantuan.

3.8 Strategi Pemberdayaan Berdasarkan Analisis SWOT

Analisis SWOT menghasilkan tujuh alternatif strategi:

1. Memperbesar skala usaha perikanan.
2. Menambah armada tangkap.
3. Memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
4. Membuat dan memberikan pelatihan tata kelola pemasaran.
5. Mengembangkan diversifikasi pengolahan ikan.
6. Merumuskan Perda terkait kestabilan harga ikan.
7. Mengelola hasil tangkap berbasis masyarakat.

Tabel 4. Alternatif Strategi Pemberdayaan

Strategi	Basis SWOT
Memperbesar skala usaha perikanan	S-O
Penambahan armada tangkap	S-O
Bantuan pemerintah tepat sasaran	W-O
Pelatihan tata kelola pemasaran	W-O
Diversifikasi pengolahan ikan	W-O
Perumusan Perda kestabilan harga ikan	S-T
Pengelolaan hasil tangkap berbasis masyarakat	W-T

Sumber: Hasil Olah data

Strategi tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan memiliki empat orientasi. Pertama, meningkatkan kapasitas produksi. Kedua, memperbaiki kualitas

tata kelola bantuan. Ketiga, meningkatkan nilai tambah dan akses pasar. Keempat, memperbaiki regulasi yang melindungi posisi nelayan. Dengan demikian, strategi pemberdayaan tidak seharusnya berhenti pada pendekatan *production-oriented*, tetapi harus berkembang menjadi *market-oriented* dan *institution-oriented*.

3.9 Prioritas Strategi Berdasarkan AHP

Hasil AHP memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai strategi mana yang harus didahulukan.

Tabel 5. Prioritas Strategi Pemberdayaan Nelayan

Peringkat	Strategi	Bobot
1	Perumusan Perda kestabilan harga ikan	45,7%
2	Bantuan pemerintah tepat sasaran	19,6%
3	Penambahan armada tangkap	12,3%
4	Memperbesar skala usaha perikanan	9,3%
5	Mengelola hasil tangkap berbasis masyarakat	4,7%
6	Diversifikasi pengolahan ikan	4,5%
7	Pelatihan tata kelola pemasaran	3,8%

Consistency Ratio (CR) = 7,7%.

Hasil tersebut merupakan temuan paling penting dalam penelitian. Strategi dengan bobot tertinggi bukan penambahan armada atau bantuan fisik, melainkan regulasi harga ikan. Artinya, masalah utama yang dirasakan dalam pemberdayaan bukan hanya kemampuan nelayan menghasilkan ikan, tetapi kemampuan nelayan memperoleh nilai ekonomi yang layak dari hasil tangkapannya. Bobot 45,7% untuk regulasi harga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap intervensi pemerintah pada mekanisme pasar. Hal tersebut sejalan dengan temuan lapangan bahwa harga ikan lebih banyak ditentukan pedagang pengumpul dan nelayan berada dalam posisi tawar yang lemah. Strategi kedua, yaitu bantuan pemerintah tepat sasaran dengan

bobot 19,6%, juga berkaitan langsung dengan persoalan implementasi program. Bantuan yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan sebagian nelayan tetap berada dalam kondisi tidak berdaya meskipun program pemberdayaan terus berjalan. Strategi ketiga adalah penambahan armada tangkap dengan bobot 12,3%. Strategi ini tetap penting karena sebagian besar armada nelayan masih berukuran kecil dan teknologi penangkapan masih sederhana. Namun, hasil AHP menunjukkan bahwa penambahan armada bukan prioritas pertama. Hal tersebut masuk akal karena penambahan kapasitas produksi tanpa membenahan pasar berpotensi hanya meningkatkan volume ikan yang masuk ke pasar dengan struktur harga yang sama. Dengan kata lain, menambah kemampuan menangkap ikan tanpa memperbaiki kemampuan menjual ikan berisiko tidak menyelesaikan persoalan kesejahteraan nelayan.

3.10 Model Pemberdayaan yang Dibutuhkan

Berdasarkan keseluruhan temuan, strategi pemberdayaan masyarakat nelayan Kecamatan Waplau dapat dibaca sebagai suatu rangkaian:

Penguatan regulasi harga → ketepatan sasaran bantuan → peningkatan armada → peningkatan skala usaha → pengelolaan berbasis masyarakat → diversifikasi produk → penguatan pemasaran.

Model tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan harus bergerak dari pola:

bantuan → nelayan

menuju:

regulasi + kelembagaan + kapasitas + produksi + pasar → kemandirian nelayan.

Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan yang digunakan dalam tulisan, bahwa pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

Karena itu, keberhasilan pemberdayaan nelayan tidak cukup diukur dari jumlah kapal, mesin, GPS atau *cool box* yang disalurkan. Ukuran keberhasilan yang lebih

substansial adalah apakah nelayan mampu mengendalikan proses produksi, memperoleh harga yang layak, mengelola kelompok secara mandiri, mengakses pasar dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Waplau Kabupaten Buru telah memberikan manfaat terhadap aktivitas usaha masyarakat pesisir dan berkontribusi terhadap perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan kelembagaan. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya merata dan belum mampu menyelesaikan persoalan struktural nelayan.

Potensi perikanan merupakan kekuatan utama masyarakat Waplau, didukung tenaga kerja, motivasi dan pengalaman melaut. Namun, kekuatan tersebut masih dihadapkan pada pendidikan yang rendah, minimnya pelatihan, pengelolaan bantuan kelompok yang belum optimal dan ketergantungan terhadap musim.

Persoalan paling serius terdapat pada aspek pemasaran. Rendahnya harga ikan, terbatasnya sarana pemasaran dan dominannya pedagang pengumpul telah melemahkan posisi tawar nelayan. Kondisi tersebut turut mendorong nelayan melakukan diversifikasi mata pencaharian, termasuk bekerja di sektor pertambangan. Analisis SWOT menghasilkan tujuh alternatif strategi pemberdayaan. Hasil AHP menempatkan perumusan Perda terkait kestabilan harga ikan sebagai prioritas utama dengan bobot 45,7%, diikuti bantuan pemerintah tepat sasaran sebesar 19,6% dan penambahan armada tangkap sebesar 12,3%. Nilai CR sebesar 7,7% menunjukkan konsistensi penilaian berada di bawah batas 10%.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan nelayan Kecamatan Waplau perlu bergeser dari pendekatan yang dominan berbasis bantuan fisik menuju pendekatan yang menggabungkan perlindungan pasar, penguatan posisi tawar, pemerataan bantuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok dan pengembangan usaha perikanan berbasis masyarakat.

5. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Buru perlu memperkuat regulasi harga ikan dan membangun mekanisme pasar yang lebih transparan sehingga nelayan tidak sepenuhnya bergantung pada pedagang pengumpul.
2. Program bantuan perlu menggunakan mekanisme identifikasi penerima yang transparan dan melibatkan kelompok nelayan sehingga bantuan tidak terkonsentrasi pada individu tertentu.
3. Setiap bantuan sarana produksi perlu disertai pelatihan dan pendampingan, terutama dalam penggunaan teknologi, pengelolaan usaha, keuangan kelompok dan pemasaran.
4. Pemerintah perlu memperbaiki fasilitas pemasaran, termasuk TPI, penyediaan es dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.
5. Penambahan armada tangkap perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya ikan, kemampuan nelayan mengelola armada dan akses pasar.
6. Pengembangan pengolahan hasil perikanan perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan nelayan terhadap penjualan ikan segar.
7. Program pemberdayaan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendampingan kelompok, bukan hanya berdasarkan periode kontrak program.

Saran tersebut sejalan dengan tesis yang menempatkan akses pemasaran sebagai kendala serius dan mendorong pemerintah daerah membuka akses pasar melalui temu bisnis, investasi, promosi dan pemanfaatan media komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles, A. T. 2001. *Sustainable Fishery Systems*. Canada: Blackwell Science Ltd.
- Craig, G. & Mayo, M. (eds.). 1995. *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*. London: Zed Books.
- Dault, A. 2008. *Pemuda dan Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Hikmat, A. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, J. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Kusnadi, Sumarjono, Sulistiowati, Yunita, Subchan & Puji. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, S. 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nikijuluw, P. H. V. 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Bogor: Proyek Pesisir.
- Nikijuluw, P. H. V. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Nurani, T. W. 2003. "Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process) Suatu Metoda untuk Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan." Dalam Darmawan dan Novita (Ed.), *Konsep Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan di Indonesia*. Bogor: Departemen.
- Rangkuti, F. 2008. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Satria, A. 2001. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Siswanto, B. 2008. *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Malang: Laksbang Mediatama.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. & Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.